

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S, 1995. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Edisi ke-1.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (EPA), E. P. (1994). *Guide to Septage Treatment and Disposal*. Cincinnati, Ohio: EPA/625/R-94/002.
- Fajarwati, Ayi. 2000. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kota Palembang (Studi Kasus : Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Ilir Timur II)*. Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 04/Men/1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukkan ahli K3
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 125/Men/1984 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja DK3N, DK3W dan P2K3.
- Metcalf & Eddy. (2003). *Wastewater Engineering : Treatment and Reuse (Fourth Edition)*. McGraw - Hill Companies , inc.
- Nasrullah. 2007. Studi Kelayakan IPLT. *Jurnal Presipitasi* 3 (2): 16-24
- Pamekas, R. 2006. Model Pelestarian Fungsi Lingkungan Perkotaan Berbasis Ekosanita-IPLT (Dengan Studi Kasus Kota Majalaya Di DAS Citarum Hulu).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang PJK3
- Peraturan Meteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 Tanggal 29 Mei 1989 Tentang Upah Minimum
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001
- SNI : 03-2398-2002 – *Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Peresapan*.
- Syahbana, Joesron Alie 2003. *Pengelolaan Prasarana Sanitasi Lingkungan oleh*

Masyarakat di Kampung Kanalsari Kota Semarang. Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 *tentang Jaminan Sosial.*

Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 *tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.* (1970). Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997. *Terkait Mengenai Syarat Baku Mutu Air Limbah Sebelum dibuang ke Lingkungan.*

UU No. 3 Tahun 1969 *tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor*